

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.
- H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Universit press.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfiki*. Bandung: PT. Revika Aditama.

Soejono & Abdurrahman. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah, Cetakan Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum dan Normatif, Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Grup.

-----, 2014, *Hukum Perumahan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

-----, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Waskito, Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Tata Ruang.

Website :

Admin, Penurunan dan Peningkatan Hak atas Tanah,
<http://www.okeproperti.co.id/mekanisme-penurunan-dan-peningkatan->

hak-atas-tanah/, diakses pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 15.00 WIB.

Eddy M. Leks, “Tahapan Perizinan yang harus dipenuhi pengembang properti”, <http://www.hukumproperti.com/berita/ini-tahapan-perizinan-yang-harus-dipenuhi-pengembang-properti/>, diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 09.07 WIB.

Humas atr bpn, “Pemberian Hak Guna Bangunan Badan Hukum”, https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur/moduleId/122856/itemName/Pemberian_Hak_Guna_Bangunan_Badan_Hukum/controller/Item/action/Detail, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 13.11 WIB.

Theresia C Pasaribu, “Prosedur dan Mekanisme Penurunan dan Peningkatan Hak atas Tanah”, <https://www.hukumproperti.com/pertanahan/prosedur-dan-mekanisme-penurunan-dan-peningkatan-hak-atas-tanah/>, diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 09.22 WIB.

Wikipedia, “Kota Padang”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang, diakses pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 10.30 WIB.

Wikipedia, “Kecamatan Koto Tangah”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kototangah>, diakses pada tanggal 30 Maret 2020 pukul 10.02 WIB.

